

## INTISARI

Perubahan pelayanan kefarmasian dari *product-oriented* menjadi *patient-oriented* menjadi pertimbangan pemerintah untuk menerapkan sebuah standar pelayanan kefarmasian agar pelayanan yang dilakukan oleh apoteker di Indonesia menjadi terstandar dan terarah. Peraturan terbaru yang memuat standar pelayanan kefarmasian di apotek adalah Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian menurut PERMENKES pada apotek-apotek di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru pada tahun 2019.

Penelitian ini adalah penelitian *non-eksperimental* dengan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan *cross-sectional*. Instrumen penelitian disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Data dikumpulkan melalui *deep interview* dengan responden yang merupakan Apoteker Pengelola Apotek di apotek Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Data profil pelayanan kefarmasian yang didapatkan dianalisa menggunakan statistik deskriptif berupa tabel persentase sehingga dapat diketahui pelaksanaan setiap parameter termasuk kategori baik, cukup atau kurang. Penelitian ini melibatkan 10 apotek untuk meninjau pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru yang memenuhi kriteria inklusi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata persentase pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek pada aspek pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai mencapai nilai 82,5% atau baik, pelayanan farmasi klinik sebesar 56,3% atau kurang, sumber daya kefarmasian mencapai skor 85% atau baik, dan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian sebesar 58,5% atau kurang.

**Kata kunci:** apotek, pelayanan kefarmasian, standar pelayanan kefarmasian.

## ABSTRACT

The conversion on pharmaceutical care from product-oriented to patient oriented has become a government's consideration to make a standardized pharmacy pharmaceutical care guide so the services that pharmacists provide to patients meet the standards. The latest regulation for a standardized pharmacy pharmaceutical care guide in Indonesia is Regulation Of Health Minister Of Indonesia Number 73 Year 2016. This study aims to evaluate the implementation of standardized pharmaceutical care guide on pharmacies in Pulau Laut Utara District Kotabaru Regency according to Regulation of Health Minister of Indonesia Number 73 Year 2016 in 2019.

This study is a non-experimental research with descriptive method from percentage data using cross-sectional approach. The instrument of this research is arranged based on Regulation of Health Minister of Indonesia Number 73 Year 2016 about Standardized Pharmacy Pharmaceutical Care Guide. The data is obtained by deep interview with respondents who are pharmacists and analyzed using descriptive statistics in the form of percentage table to know the implementation of this regulation fall into categories such as good, enough, or lack. This study involved 10 pharmacies to evaluate the implementation of standardized pharmaceutical care guide in pharmacies.

The conclusion of this study indicate the average percentage of management of pharmaceutical preparations, medical devices, and consumable medical material is 82,5% or fall under the 'good' category, clinical pharmacy services is 56,3% or fall under the 'lack' category, pharmaceutical resources is 85% or fall under the 'good' category, and evaluation of service quality is 58,5% or fall under the 'lack' category.

**Keywords:** pharmacy, pharmaceutical services, standardized pharmaceutical care guide in pharmacies